

Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Melaksanakan Kewajiban
Terkait dengan Rahasia Jabatan dalam AD/ART PT. Joloy Timur
Berjaya (Studi putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw) = Perlindungan
Hukum Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban Terkait
dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya
(Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Mtw)

Milzam Elkarami Bahar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501899&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Nama

: Milzam Elkarami

NPM

: 1606960731

Judul

: Perlindungan Hukum Bagi

Notaris Dalam Melaksanakan Kewajiban

Terkait dengan

Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya

(Studi Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2017/

PN.Mtw)

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan

Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-

undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat

(11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai

dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU–X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri

kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat

notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan

Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para

penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami

kedudukan notaris sesuai UUJN.

Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih

tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014

yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi

politik.

Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.

attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">The provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUJN. Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side. Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.